

Imajinasi Pluralitas

— Hakimul Ikhwan *)

*“Imagination is more important than knowledge.
For knowledge is limited to all we now know and understand,
while imagination embraces the entire world,
and all there ever will be to know and understand”*

(Albert Einstein)

Imajinasi jauh lebih dahsyat dari ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan memahami realitas berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, imajinasi bisa melampaui kaidah tersebut untuk merekonstruksi pengetahuan dan realitas masa depan. Sayangnya, dari 4.264 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang tercatat di Indonesia tahun 2015 (Tempo.co 2015), sebagian besar berorientasi pada penyampaian (*delivery*) pengetahuan dan sangat sedikit yang berorientasi untuk menumbuhkan daya ‘imajinasi’ dan kreativitas.

Pelajaran di bangku sekolah dan perguruan tinggi mengajarkan pengetahuan tentang Indonesia yang plural. Pluralitas tersebut digambarkan, misalnya, dalam keberagaman enam agama (yang diakui Negara) serta 400an suku bangsa dan bahasa. Selain itu, buku-buku teks juga mengajarkan tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tidak hanya dalam pelajaran, dalam praktik kehidupan dan pengalaman sosial sehari-hari keragaman tersebut juga ‘dialami’ langsung orang para siswa dan mahasiswa. Di pusat-pusat perbelanjaan, tempat wisata dan fasilitas umum seperti bis kota dan kereta api mereka bisa melihat banyak keberagaman. Tetapi, apakah pelajaran dan pengetahuan tersebut membentuk sikap toleran dalam merespons perbedaan dan keberagaman? Apakah persinggungan antar-entitas yang beragam memperkaya makna pluralitas sosial di ruang publik?

Merujuk pada berbagai peristiwa kekerasan bernuansa agama, etnis, suku, dan kedaerahan, bahkan peristiwa tawuran antar-pelajar yang hampir setiap hari terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang, dan pengalaman dalam, keberagaman masih belum berpengaruh dalam membentuk sikap toleran terhadap perbedaan dan keberagaman. Akibatnya, tidak jarang ekspresi keberagaman di ruang publik dimaknai sebagai bentuk ‘ancaman’ terhadap eksistensi identitas

* Peneliti Youth Studies Centre FISIPOL UGM dan Staff Pengajar Jurusan Sosiologi UGM.

internal kelompok. Hal ini menggambarkan pengetahuan dan pengalaman keberagaman semata menyentuh kognisi tetapi tidak bermakna (*less meaningful*) membentuk afeksi, apalagi solidaritas sosial bersama.

Oleh karenanya, pelajaran dan pengalaman dalam keberagaman saja tidak cukup. Perlu imajinasi sosial yang bisa menembus batas-batas identitas, terutama menyangkut identitas ‘terberi’ (bawaan/*given*). Imajinasi, sebagaimana dikatakan Albert Einstein di atas, bisa lebih *powerful* dibandingkan pengetahuan tentang keberagaman. Apalagi ditengah masyarakat yang terlanjur terpolarisasi kedalam ‘kotak-kotak’ identitas partikular agama, etnis, suku, dan kedaerahan (Reid 2009). Dalam masyarakat yang seperti ini, keberagaman semata mengisi ruang publik tetapi tidak membuatnya kaya afeksi, empati, dan solidaritas (Cooper 2004). Orang-orang dari agama, etnis, suku, dan daerah berbeda bisa saja menikmati ruang (*space*) secara bersama seperti di bis kota, pasar, dan mall. Tetapi, ruang-ruang tersebut tidak membuat entitas sosial yang beragam tersebut saling bertukar cara pandang dan pemahaman tentang satu sama lainnya. Mereka hadir di ruang yang kosmopolitan tetapi tidak saling memperkaya pemaknaan tentang keberagaman (Hollinger 2006; Fine 2007). Bahkan, tidak jarang yang terjadi justru polarisasi dan penguatan identitas internal yang *antagonistic* terhadap identitas lain. Walhasil, gesekan antar-individu dengan mudah bisa mengescalasi konflik sosial dalam skala luas dengan mobilisasi identitas agama, etnis, suku, dan kedaerahan (Braithwaite et al. 2010).

Dengan imajinasi, menurut Anderson (1991), beragam kelompok etnis, suku, agama, dan kedaerahan bisa melampaui identitas primordial dan merekonstruksi identitas nasional Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan imajinasi, proses rekonstruksi identitas nasional tidak perlu melalui interaksi langsung, tatap wajah

(*face to face interaction*). Pada era kolonial, ketika teknologi internet dan digital belum ditemukan, imajinasi ‘Indonesia’ terbentuk melalui *print capitalism* (media cetak) yang menghadirkan ‘dialog imajiner’ antar-elemen Indonesia yang tersebar di gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Melalui imajinasi tentang ‘tanah tumpah darah, bangsa, dan persatuan nasional’ para peserta Kongres Pemuda II tahun 1928 memobilisasi semangat membangun rumah bersama, Indonesia.

Memang tidak mudah mendamaikan identitas nasional dengan identitas partikular seperti agama, etnis, suku, dan kedaerahan. Apalagi mengharapkan keduanya melahirkan sintesis identitas bersama yang solid. Selama ini, ‘proyek-proyek’ nasionalisme telah menempatkan identitas nasional lebih superior dibandingkan identitas partikular. Atas nama proyek nasionalisme maka agama, misalnya, ‘dilarang’ hadir di ruang publik selama era Uni Soviet. Tetapi pada akhirnya, *toh*, agama bisa ‘lahir kembali’ pasca kejatuhan Uni Soviet dan bahkan menjadi salah satu faktor determinan dalam konflik Rusia dan Ukraini. Itu artinya, identitas yang berkaitan dengan agama, termasuk juga suku, etnis, dan kedaerahan tidak begitu saja bisa dihilangkan.

Jangankan agama yang memiliki dimensi teologis transendental, almamater atau afiliasi organisasi sosial dan politik saja bisa melahirkan perilaku *chauvinistik*, yaitu kesetiaan dan kecintaan ekstrim terhadap kelompok internal yang diikuti dengan sikap destruktif-violent terhadap pihak yang dianggap musuh. Saat ini, ketika peradaban digital dan internet telah mampu ‘melipat ruang,’ hasrat chauvenistik sepertinya belum berhasil ‘dilipat’ seperti tercermin dalam fenomena Negara Islam di Irak dan Siria (ISIS – *Islamic State in Iraq and Syria*), peristiwa Rohingya, tragedi para pencari suaka di Eropa Barat dan Australia, serta ketegangan antara dua Korea (Utara dan Selatan). Termasuk,

kekerasan terhadap para pengikut Syiah dan Ahmadiyah, juga umat Kristiani di beberapa wilayah di Indonesia tidak semata didorong oleh agama — dan kesalehan — tetapi juga hasrat kuasa *chauvinistic* atas Masjid, Gereja, Sekolah, bahkan ‘umat.’

Bagaimana membangun imajinasi yang konstruktif menembus lintas batas identitas? Tentu tidak mudah. Tetapi, menurut Mills (2000), imajinasi bisa dilatih dan dibentuk. Mills, setelah beberapa tahun mengajar para mahasiswa akhirnya memformulasikan metode ‘imajinasi’ dalam proses pembelajaran. Pada tahap awal, mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi problema personal yang dialami atau ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, merekonstruksi problema tersebut ke dalam spektrum dan dimensi yang lebih luas untuk melihat apakah masalah personal tersebut juga dihadapi oleh orang lain dalam *scope* yang lebih luas. Dalam proses ini maka seorang individu dilatih untuk melihat dan memahami realitas dalam perspektif yang lebih luas, melampaui sekat-sekat personal. Selain itu, menghubungkan antara problema ‘personal’ dan ‘publik’ juga melatih kemampuan *reflexive* dan kritis dalam melihat dan memahami pengalaman-pengalaman personal keseharian.

Selain itu, imajinasi pluralistas dapat dibangun melalui penciptaan ‘ruang-ruang’ sosial yang terbuka (Mouffe 1999). Melalui ruang tersebut terjadi ‘perjumpaan sosial’ serta pertukaran makna dan cara pandang antar berbagai elemen sosial yang beragam. Misalnya, ketersediaan taman-taman kota, warung-warung kopi, *angkringan*, festival budaya, pertunjukan kesenian, dan sebagainya. Ruang publik tersebut menjadi medium berlangsungnya akumulasi dan persenyawaan pengetahuan dan pemahaman tentang orang lain (*other*), nilai (*values*), dan standar moralitas para pihak.

Jika ruang publik yang kondusif dan konstruktif tersebut tidak tercipta, maka yang terjadi tidak hanya perebutan kuasa

ruang dan representasi tetapi juga perilaku anarkis destruktif bahkan kehidupan sosial yang *chaotic* (Purdey 2006; Coppel 2006). Apalagi jika ketiadaan ruang publik tersebut disubstitusi oleh mall, hotel, dan berbagai *icon* industrial lainnya yang mempertukarkan nilai dan moralitas sosial dalam kalkulasi kapital dan materialistik. Dengan lain kalimat, jika ruang publik tidak hadir dan sebagai gantinya adalah ruang-ruang konsumerisme yang berorientasi pada pemenuhan hasrat konsumsi, maka akan muncul respons balik yang tidak kalah ekstrim dari para ‘laskar’ *chauvinistic* yang mempromosikan identitas dan nilai kelompok partikular. Narasi yang muncul adalah mempertahankan identitas internal-partikular yang sedang terancam oleh pihak lain, termasuk oleh modernitas (Kymlicka 2001). Tidak mengherankan jika orang seperti Abu Ghulam (AG), misalnya, justru menjadi semakin ekstrim dan radikal dalam menyikapi peradaban modern, sekalipun telah dipenjarakan — dan disiksa — oleh Densus 88. Bagi AG, siksaan yang diterimanya sebagai ‘pelaku terorisme’ tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan surga yang dijanjikan bagi para ‘mujahid.’ Bahkan, ketika suatu hari AG mendapat kabar bahwa adik bungsunya tewas mengenaskan di medan perang Siria akibat peluru tank yang tepat mengenai kepala adiknya, sama sekali tidak secuilpun duka dan kesedihan di matanya, juga di mata orang tuanya, bahkan mungkin di tengah keluarga besarnya. Sebaliknya, yang terbayang dibenaknya adalah para bidadari surga yang menjemput sang adik ke hadapan Tuhan. Persis seperti mimpi yang diceritakan adiknya seminggu sebelum berangkat ke Siria. Mimpi yang diyakini adiknya, juga AG, sebagai pertanda bahwa bidadari surga adalah ‘kepastian.’ Bidadari yang akan merubah ‘status jomblo’ adiknya.

Berbeda dengan AG — dan keluarganya — yang tumbuh di dalam ruang *urban* yang terpecah dan violent, para pemuda Maluku

dalam *Moluccas Hiphop Community* (MHC) dan *Ambon Band Community* (ABC) justru bangkit dari ‘keterpecahan sosial’ pasca konflik bernuansa agama. Mereka membuat lagu, bernyanyi, mengaransemen musik yang sarat pesan damai dan persaudaraan, kepedulian kepada sesama, dan cinta kasih umat manusia. Para generasi muda Maluku — anak-anak korban konflik 1999 — menciptakan ruang interaksi sosial yang memungkinkan ‘pertemuan lintas batas’ identitas. Anak-anak korban konflik memulai perjumpaan sosial di arena bermain di ruang-ruang terbuka. Para perempuan papalele menggelar dagangan di pasar. Masyarakat adat juga membentuk forum dan membangun dialog para tokoh agama. Melalui ruang tersebut, prasangka buruk (*prejudice*) dan pandangan yang melihat ‘orang lain’ sebagai musuh dan ancaman bisa terkikis.

Dalam konteks Maluku, imajinasi masa depan tidak terlepas dari memori kolektif masa lalu. Kerinduan untuk berkumpul bersama teman-teman dari agama dan kelompok yang berbeda. Dalam ikatan pela dan gandong yang kemudian mendorong pemuda Maluku melakukan beragam kreativitas. Melalui komunitas, memori kolektif masa lalu yang sempat tercerabik akibat konflik direkonstruksi kembali bersamaan dengan membangun imajinasi masa depan yang damai dalam *basudara*. Komunitas Teater Merah Saga, misalnya, sekalipun anggotanya mayoritas Muslim tetapi dipimpin oleh seorang Perempuan Kristen. Begitu juga dengan Negeri Tulehu melalui Sanny Tawainela, sosok Sanny dalam film “Cahaya dari Timur” merajut kembali imajinasi masa depan melalui media sepak bola tanpa memandang perbedaan agama.

Singkat kata, kekuatan para pemuda bukan pada sumber daya material yang dimilikinya. Bukan juga semata pada kemampuan intelektualnya. Tetapi pada kekuatan imajinasinya, sebagaimana para pemuda peserta Kongres Pemuda II tahun

1928, atau Pemuda Soekarno dan Hatta yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Dengan imajinasi, para pemuda pejuang tersebut tidak hanya mampu menembus sekat-sekat agama, etnis, suku, dan kedaerahan tetapi juga menembus batas peradaban hampir satu abad kemudian, ketika Indonesia memasuki usia yang ke 70 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict Richard O’Gorman. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
- Braithwaite, John, V. A Braithwaite, Michael Cookson, and Leah Dunn. 2010. *Anomie and Violence Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Acton, A.C.T.: ANU E Press.
- Cooper, Davina. 2004. *Challenging Diversity: Rethinking Equality and the Value of Difference*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
- Coppel, Charles A. 2006. *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. Routledge.
- Fine, Robert. 2007. *Cosmopolitanism*. New Edition. London ; New York: Routledge.
- Hollinger, David A. 2006. *Cosmopolitanism and Solidarity: Studies in Ethnoracial, Religious, and Professional Affiliation in the United States*. Madison, Wis: University of Wisconsin Press.
- Kymlicka, Will. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford, UK New York: Oxford University Press.
- Mills, C. Wright. 2000. *The Sociological Imagination*. Oxford University Press.
- Mouffe, Chantal. 1999. “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?” *Social Research* 66 (3): 745–58.

- Tempo.co. 2015. "Pemerintah Dituding Obral Izin Pendirian Universitas Swasta." *Tempo Nasional*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/04/079672129/pemerintah-dituding-obral-izin-pendirian-universitas-swasta>.
- Purdey, Jemma. 2006. *Anti-Chinese Violence in Indonesia: 1996-99*. University of Hawaii Press.
- Reid, Anthony. 2009. *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*. 1st edition. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.